

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	www.voi.id
Media Cetak	

Komunitas Pesepeda Ngeluh ke DPRD, Jalur Sepeda di Jakarta Tak Lagi Diperhatikan Sejak Era Heru Budi

Diah Ayu WardaniReporter/ Advento Christian SaudaleEditor

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli mengaku dirinya mendapat keluhan dari komunitas pesepeda Bike to Work (B2W) terkait jalur sepeda di Jakarta saat ini.

Kata Taufik, B2W mengeluhkan soal kurangnya perhatian perawatan jalur sepeda sejak era kepemimpinan Heru Budi Hartono menjabat Pj Gubernur DKI Jakarta yang menggantikan Anies Baswedan.

"Kasihannya, teman-teman Bike to Work sudah curhat ke saya. Curhat soal perhatian terhadap lajur sepeda sekarang sudah hilang, sudah enggak ada lagi sejak perhatian pimpinan," kata Taufik saat dihubungi, Senin, 26 Juni.

Padahal, menurut Taufik, Heru juga perlu menjaga keberlangsungan fasilitas sepeda sebagai transportasi ramah lingkungan. Terlebih, buruknya kualitas udara di Ibu Kota tengah menjadi perhatian publik.

"Ini kan perlu penanganan komprehensif. Karena kalau banyak orang naik sepeda atau meminggirkan kendaraan pribadi, itu salah satu cara mengurangi polusi udara. Mengingat, 80 persen polusi udara Jakarta dari kendaraan berbahan bakar fosil," tegasnya.

Sejatinya, Pemprov DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran untuk jalur sepeda sebesar Rp7,5 miliar dalam APBD tahun anggaran 2023.

Rinciannya, anggaran sebesar Rp2 miliar dialokasikan untuk melakukan evaluasi atau kajian terhadap jalur sepeda eksisting, Rp500 juta untuk sosialisasi jalur sepeda di tiap kota administratif, dan Rp5 miliar untuk optimalisasi jalur sepeda yang sudah ada.

Dalam program evaluasi dengan anggaran Rp2 miliar, Dinas Perhubungan DKI Jakarta nantinya akan melakukan kajian mengenai kondisi penggunaan jalur sepeda pada ruas-ruas jalan yang sudah ada.

Sementara, optimalisasi jalur sepeda dengan anggaran Rp5 miliar akan digunakan untuk perbaikan hingga pemindahan jalur sepeda yang dianggap kurang optimal.

Namun, Anggota Fraksi PKS DPRD DKI itu menyebut sampai saat ini Dinas Perhubungan DKI Jakarta belum melaporkan perkembangan evaluasi jalur sepeda yang dibangun sejak era Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI itu.

"Ternyata, sampai sekarang belum dilaksanakan juga. seharusnya sih anggarannya sudah dicairkan. Makanya nanti saya akan tanya deh ke dishub. kalau di berita terakhir kan katanya sudah akan dilaksanakan. Apalagi ini menjelang KTT ASEAN, September. Harusnya mah sudah rapi, tuh. Malu-maluin, deh, kalau belum," jelas dia.

Karenanya, Taufik menuturkan bahwa Komisi B DPRD DKI akan memanggil jajaran Dinas Perhubungan untuk meminta penjelasan terkait hasil evaluasi jalur sepeda dalam rapat kerja beberapa waktu mendatang.